

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI PADA KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

M. HAFID MAGRIBY
NPM. 1802110059



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 17 Februari 2025

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

M. HAFID MAGRIBY
NPM. 1802110059

Dengan judul:

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN
PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI PADA KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH)**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Budi Safatul Anam, SE., M.Si
NIK. 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

Dr. Surna Lastri, SE, M.Si, Ak
NIP. 19740221 200801 2 001

Pembimbing II

Fathul Khaira, SE., M.Si
NIK. 19890610 201708 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi,

Dr. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 17 Februari 2025

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

M. HAFID MAGRIBY
NPM. 1802110059

Dengan judul:

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN
PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI PADA KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH)**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal, 11 Februari 2025

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

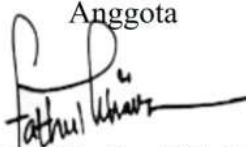
Ketua


Dr. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris


Dr. Surna Lastri, SE, M.Si, Ak
NIP. 19740221 200801 2 001

Anggota


Fathul Khaira, SE., M.Si
NIK. 19890610 201708 2 001

Anggota

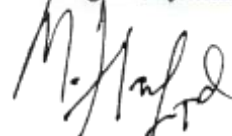

Eva Susanti, SE, M.Si
NIK. 19760202 200607 2 001


Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi
Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 17 Februari 2025
Yang Menyatakan



M. HAFID MAGRIBY

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **M. HAFID MAGRIBY**
NPM : 1802110059
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 17 Februari 2025

Banda Aceh, 17 Februari 2025
Yang Menyatakan,


M. HAFID MAGRIBY

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, hidayah, ketabahan, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh”**. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Aceh .

Dalam kesempatan ini penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan dan penyusunan skripsi ini.

1. Beribu terimakasih penulis ucapkan kepada Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan doa dan restunya kepada penulis
2. **Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdaiyah Banda Aceh,
3. Terimakasih kepada Ibu Dr. Surna Lastri, S.E., M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktunya membantu penulis menyelesaikan skripsi ini
4. Terimakasih kepada Ibu Fathul Khaira, S.E., M.Si selaku pembimbing II Penulis yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Termakasih pula kepada teman seperjuangan angkatan 2019 telah banyak memberikan dorongan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya staf pengajar dan Civitas Akademik pada prodi Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan serta membantu penulis.

Akhir kata penulis memanjatkan doa semoga Allah SWT membalas semua budi baik kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, Februari 2025

Penulis

M. Hafid Magriby

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Praktis	8
1.4.2 Manfaat Teoritis	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Pengelolaan Dana Desa	10
2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa	10
2.1.1.2 Prinsip Prinsip Pengelolaan Dana Desa	11
2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa.....	12
2.1.1.4 Indikator Pengelolaan Dana Desa	13
2.1.2 Transparansi	14
2.1.2.1 Pengertian Transparansi	14
2.1.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Transparansi	14
2.1.2.3 Indikator Transparansi	16
2.1.3 Akuntabilitas.....	10
2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas	10
2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas.....	18
2.1.3.3 Indikator Akuntabilitas	19

2.1.4	Pengawasan	20
2.1.4.1	Pengertian Pengawasan	20
2.1.4.2	Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan	20
2.1.4.3	Indikator Pengawasan	21
2.2	Penelitian Sebelumnya	22
2.3	Kerangka Pemikiran	25
2.3.1	Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa	25
2.3.2	Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa	26
2.3.3	Pengaruh Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa	26
2.4	Hipotesis	28
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1	Desain Penelitian	29
3.1.1	Tujuan studi	29
3.1.2	Jenis Penelitian	29
3.1.3	Horizon Waktu	29
3.1.4	Unit Analisis	29
3.2	Populasi dan Sampel	30
3.2.1	Populasi Penelitian	30
3.2.2	Sampel Penelitian	30
3.3	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	31
3.4	Operasional Variabel	31
3.5	Teknik Analisis Data	33
3.6	Pengujian Data	34
3.6.1	Pengujian Validitas	34
3.6.2	Pengujian Reliabilitas	35
3.7	Pengujian Hipotesis	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1	Hasil Penelitian	37
4.1.1	Gambaran Umum Kecamatan Banda Raya	37
4.1.2	Karakteristik Responden	38
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian	40
4.2.1	Transparansi	40
4.2.2	Akuntabilitas	41
4.2.3	Pengawasan	42

4.2.4	Pengelolaan Dana Desa	43
4.3	Hasil Pengujian Data	44
4.3.1	Pengujian Instrumen	44
4.3.2	Regresi Linier Berganda	49
4.3.3	Koefesien Determinasi	50
4.3.4	Hasil Pengujian Hipotesis	51
4.4	Pembahasan	52
4.4.1	Pembahasan Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	52
4.4.2	Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan dana desa	53
4.4.3	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan dana desa	54
4.4.4	Pengaruh Pengawasan terhadap Pengelolaan dana desa .	55
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Saran	57
	DAFTAR PUSTAKA	58
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Kecamatan Banda Raya	5
Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya	23
Tabel 3.1 Sampel Penelitian	30
Tabel 3.2 Skala Pengukuran	31
Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel	32
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	39
Tabel 4.2 Transparansi	40
Tabel 4.3 Akuntabilitas	41
Tabel 4.4 Pengawasan	42
Tabel 4.5 Pengelolaan Desa	43
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Validitas	45
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Reliabilitas	46
Tabel 4.8 Coefficients	50
Tabel 4.9 Model Summary	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	27
Gambar 4.1 P.Plot	48
Gambar 4.2 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Kuesioner
Lampiran II	Tabulasi Data
Lampiran III	Frekuensi Tabel
Lampiran IV	Correlation
Lampiran V	Realiability
Lampiran VI	Regression

ABSTRAK

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BANDA RAYA KOTA Banda Aceh

M. HAFID MAGRIBY
1802110059

Pembimbing 1) : Dr. Surna Lastri, SE., M.Si, Ak
Pembimbing 2) : Fathul Khaira, SE., M.Si

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kepala Urusan (Kaur). Dari masing-masing desa yang ada di Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dengan jumlah 50 orang. Pengujian dan analisis data primer dilakukan dengan menggunakan perangkat SPSS Versi 26 dengan formulasi regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat bahwa Transparansi, akuntabilitas dan pengawasan berpengaruh dan signifikan terhadap Pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Nilai konstanta sebesar 3,911 dapat diartikan bahwa tanpa adanya transparansi akuntabilitas dan pengawasan, pengelolaan dana desa telah ada nilai sebesar 3,911. Nilai F_{hitung} sebesar $162,279 > F_{tabel}$ sebesar 2,802, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima. Artinya transparansi, akuntabilitas dan pengawasan berpengaruh dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Nilai t_{hitung} sebesar $2.800 > t_{tabel}$ sebesar 2,012, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima. Artinya transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Nilai t_{hitung} sebesar $4,300 > t_{tabel}$ sebesar 2,012, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima. Artinya akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Nilai t_{hitung} sebesar $2,455 > t_{tabel}$ sebesar 2,012, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima. Artinya pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

Kata Kunci : *Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan dan Pengelolaan Dana Desa*

ABSTRACT

THE EFFECT OF TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, AND SUPERVISION ON VILLAGE FUND MANAGEMENT IN BANDA RAYA DISTRICT, BANDA ACEH CITY

M. HAFID MAGRIBY

1802110059

Supervisor 1): Dr. Surna Lastri, SE., M.Si, Ak

Supervisor 2): Fathul Khaira, SE., M.Si

The purpose of this study was to determine the effect of transparency, accountability and supervision on village fund management in Banda Raya District, Banda Aceh City. The population in this study were the Village Head, Village Treasurer, Village Secretary, Village Consultative Body (BPD), and Head of Affairs (Kaur). From each village in Banda Raya District, Banda Aceh City with a total of 50 people. Testing and analysis of primary data were carried out using SPSS Version 26 with multiple linear regression formulation. Based on the results of the research that has been conducted, it was found that Transparency, accountability and supervision have a significant effect on Village Fund Management in Banda Raya District, Banda Aceh City. The constant value of 3.911 can be interpreted that without transparency, accountability and supervision, village fund management has a value of 3.911. The Fcount value of 162.279 > Ftable of 2.802, so the null hypothesis (Ho) is rejected and the alternative hypothesis (Ha) is accepted. This means that transparency, accountability and supervision have a significant effect on village fund management in Banda Raya District, Banda Aceh City. The tcount value of 2.800 > ttable of 2.012, so the null hypothesis (Ho) is rejected and the alternative hypothesis (Ha) is accepted. This means that transparency has an effect on village fund management in Banda Raya District, Banda Aceh City. The tcount value of 4.300 > ttable of 2.012, so the null hypothesis (Ho) is rejected and the alternative hypothesis (Ha) is accepted. This means that accountability has an effect on the management of village funds in Banda Raya District, Banda Aceh City. The t-value of 2.455 > t-table of 2.012, so the null hypothesis (Ho) is rejected and the alternative hypothesis (Ha) is accepted. This means that supervision has an effect on the management of village funds in Banda Raya District, Banda Aceh City.

Keywords: Transparency, Accountability, Supervision and Management of Village Funds

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Permasalahan

Undang-Undang No 3 tahun 2024 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pendanaan dari setiap pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah melalui pengelolaan dana desa yang maksimal (Damayanti, 2018).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 145 Tahun 2023 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.

Terkait pengelolaan dana desa, pemerintah desa haruslah bersifat transparansi dan adanya pengawasan pada dana tersebut. Ada tiga kementerian membentuk satuan tugas untuk mengawasi dana desa ini, yaitu kementerian desa PDTT, kementerian keuangan, dan kementerian dalam negeri. Selain itu juga diawasi oleh BPK, KPK, BPKP, NGO serta peran masyarakat untuk mengawasi juga ditingkatkan yaitu atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa yang baik wajib dilaksanakan. Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggungjawab bendahara desa, melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa diantaranya yaitu akuntabilitas, transparansi dan pengawasan.

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Tahap transparansi pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan

pengeluaran pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa (Irfan, 2017).

Transparansi pengelolaan keuangan dana desa wajib dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa desa dapat memenuhi prinsip akuntabilitas secara jelas. Informasi publik diatur dalam Peraturan Presiden No.18 tahun 2020 tentang pembangunan desa dalam jangka panjang dengan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Desa menjadi salah satu bagian dalam UU KIP tersebut, namun transparansi pengelolaan dana desa dianggap sebagai risiko bagi sebagian pejabat publik. Transparansi memiliki beberapa ukuran, yaitu *informativeness* (informatif) dan *disclosure* (pengungkapan). Sehubungan dengan kapasitas pengelolaan keuangan tersebut, aspek yang perlu dicermati yaitu standar akuntansi keuangan dan pemanfaatan aplikasi keuangan desa. Tertutupnya informasi dan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan desa dinilai sensitif jika dihadapkan pada kewajiban pemerintah desa untuk memenuhi aspek transparansi.

Selain transparansi, akuntabilitas juga dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa. Salah satu unsur utama dari *good governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban atas suatu keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan secara berkala (Mardiasmo, 2012:46). Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan,

karena dengan adanya akuntabilitas maka dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai pemerintahan desa.

Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami, masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah. Akuntabilitas bukan sekedar pertanggungjawaban keuangan secara formal suatu organisasi, tetapi merupakan pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah sumber keuangan dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi kepada kepentingan publik.

Pengawasan juga ikut mempengaruhi pengelolaan dana desa, Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya (Pangaribowo, 2018). Pengawasan dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Apapun bentuknya, pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah

pembangunan dengan cara melibatkan diri dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan agar pemerintahan dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Artinya bahwa pengawasan dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan juga menyampaikan hasil surat/laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan organisasi atau lembaga, yang sudah diteliti.

Provinsi Aceh pertama kali mendapatkan alokasi dana desa pada tahun 2015 sebesar Rp.20.766,2 miliar kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp.71.000,0 miliar pada tahun 2024. Total dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp.538,9 triliun, yang akan dialokasikan kepada 6.945 gampong atau desa di 23 kabupaten/kota. Kecamatan Banda Raya merupakan salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh yang mendapatkan aliran dana desa dari Pemerintah. Berikut rincian pengalokasian dana desa di kecamatan Banda Raya tahun anggaran 2024.

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa Kecamatan Banda Raya

No	Nama Desa	Jumlah Anggaran
1	Geuceu Komplek	819.306.000
2	Lamlagang	728.605.000
3	Geuceu Iniem	628.223.000
4	Geuceu Kayee Jato	970.532.000
5	Lam Ara	802.185.000

No	Nama Desa	Jumlah Anggaran
6	Lhong Raya	746.356.000
7	Mibo	882.185.000
8	Peunyerat	746.356.000
9	Lhong Cut	882.159.000
10	Lampeuot	761.483.000
Total		9.621.789.000

Sumber: RPKM 2024

Kecamatan Banda Raya mendapat alokasi dana desa tahun anggaran 2024 sebesar Rp.9.621.789 miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan di salurkan untuk 10 desa yang ada di Kecamatan Banda Raya.

Saat ini, dana desa telah menjadi sorotan publik karena banyaknya tindak kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2015 hingga 2024, terdapat lebih dari 900 kasus korupsi terkait dana desa (Kompas, 2024). Dilansir dari Dialektis, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) telah mencatat 27 kasus di Aceh sepanjang tahun 2021-2022. Kasus tertinggi ialah terhadap penggunaan dana desa. Fenomena yang pernah terjadi di tahun 2022, terdapat 10 desa yang ada di kota Banda Aceh terlambat menyalurkan dana desa (Agusthian, 2020). Hal ini diakibatkan karena desa tersebut belum melengkapi persyaratan yang diperlukan dan diharapkan menjadi pelajaran. Desa Lam Ara merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Desa Lam Ara juga termasuk pada desa yang menerima ADD. Pada pengelolaan sumber daya yang dimiliki, seharusnya Desa Lam Ara mengalokasikan 30% belanja tidak langsung dan 70% belanja langsung, namun pada kenyataannya pengalokasian terhadap belanja tidak langsung kurang dari 30% dan pengalokasian belanja langsung

kurang dari 70%. Hal ini tidak sejalan dengan peraturan perundangan yang telah berlaku dan dapat menjadi sebuah sumber penyimpangan (Agusthian, 2020).

Penelitian ini serupa dengan penelitian Rosa (2024) yang meneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Banda Aceh dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan tingkat transparansi memiliki pengaruh simultan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan Making (2021) dengan hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa Dikesare kecamatan Lebatukan kabupaten Lembata.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dengan anggaran desa desa yang semakin meningkat disetiap tahunnya dan banyaknya kasus yang memicu kecenderungan kecurangan pada pengelolaan dana desa, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan dana desa Di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh?

2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh?
4. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pengawasan secara simultan terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
4. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa
2. Memberikan masukan bagi pegawai yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa

3. Bagi perangkat desa dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kinerjanya.
4. Bagi pengelola dana desa, dapat menjadi masukan agar lebih akuntabel, transparan dalam meningkatkan pengelolaan dana desa.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan bagi pembaca mengenai transparansi, akuntabilitas, pengawasan dan Pengelolaan dana desa.
2. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis dalam ruang lingkup yang sama dimasa yang akan datang untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil skop pada konsentrasi akuntansi sektor publik dengan unit analisis uji pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengelolaan Dana Desa

2.1.1.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Menurut Hanifah, dkk (2019: 55) Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber daya lain. Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran. Menurut Handoko (2016:87) pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja

setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain. Pengelolaan dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mulyaningsing, 2019:49).

2.1.1.2 Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Menurut Herlianto (2017:81), menyatakan dalam mengatur pengelolaan

Dana Desa harus sesuai dengan prinsip dana desa yaitu:

1. Semua aktivitas yang dibiayai dana desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
3. Dana desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
4. Aktivitas yang didanai oleh dana desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
5. Dana desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Menurut Ultafiah (2017) keuangan desa dikelola berdasarkan asas ADD

yaitu:

1. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa Yang Bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN.
2. peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang 31 Tahun 1999 Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, maka prinsip penggunaan anggaran desa pada umumnya berhubungan dengan dana desa yang nantinya harus dilaporkan ke pemerintah dan juga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu berupa peraturan pemerintah ataupun undang-undang.

2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa

Penggunaan ADD menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dalam penjelasan pasal 10, yakni sebesar 70 % untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dan sebesar 30 % untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa. faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan alokasi dana desa adalah komunikasi kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan (Solekhan, 2014:191). Menurut Wijaya (2018:94) pengelolaan Dana Desa Pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung, yaitu: dukungan kebijakan dari pemerintah sekitar dan kualitas sumber daya manusia. Namun, juga menemui beberapa faktor penghambat.

Menurut Rahman (2016:9), ada 2 faktor dalam pengelolaan dana desa yaitu ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa yaitu :

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan pada desa Wonorejo, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dalam pelaksanaan dalam ADD cukup tinggi.

2. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD pada desa wonorejo yaitu rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SD sedangkan perangkat desa sendiri mayoritas lulusan SMP

2.1.1.4 Indikator Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan apartur desa suatu untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Keikutsertaan atau keterlibatan perangkat desa merupakan indikator penting dalam mengukur dalam peneglolaan dana desa. Keterampilan atau kemampuan yang diperlukan apartur desa yang ditunjukkan oleh kemampuan dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan, beberapa indikator pengelolaan dana desa yakni: (Hanifah, dkk (2019) yaitu :

1. Perencanaan
Perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
2. Pelaksanaan
Penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Walikota.
3. Penatausahaan
Pencatatan baik dari setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta penutupan dilakukan di setiap akhir bulan
4. Pelaporan Kepala Desa
Menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui camat
5. Pertanggungjawaban
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

2.1.2 Transparansi

2.1.2.1 Pengertian Transparansi

Menurut Undang-undang Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab IV, pasal 14 huruf h menjelaskan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

Menurut Mulyaningsih (2019:64) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Ardiyanti (2019) menyatakan transparansi sebagai prinsip membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Menurut Sugiman (2018:32) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaannya pada peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Transparansi

Transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan dengan adanya

keterbukaan informasi maka publik dapat ikut serta dalam memberikan aspirasi atau suara dalam pengambilan keputusan meskipun hanya di beberapa komponen saja. Transparansi pula dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah (Mulyaningsih, 2019).

Transparansi memiliki tiga faktor dan karakteristik, Mardiasmo (2012:19) mengemukakan faktor dan karakteristik tersebut yaitu :

1. Informatif (*Informative*) Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
 - a. Tepat waktu
Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya, pengambilan keputusan tersebut.
 - b. Memadai
Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
 - c. Jelas
Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
 - d. Akurat Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.
 - e. Dapat diperbandingkan
Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.
 - f. Mudah diakses
Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
2. Keterbukaan (*openness*) Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
3. Pengungkapan (*disclosure*) Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.
 - a. Kondisi keuangan suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.
 - b. Susunan pengurus struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.

- c. Bentuk perencanaan dan Hasil dari kegiatan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.1.2.3 Indikator Transparansi

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholders yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, kalau sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna dan stakeholders lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi (Mondong, 2013).

Indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan *Good Governance* menurut Mulyaningsih (2019:66), yaitu :

1. Ketersediaan Payung hukum bagi akses informasi publik
2. Ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi
3. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengakses informasi
4. Ketersediaan informasi untuk dipublikasikan kepada publik
5. Kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi publik

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Ritonga, 2022:10).

Menurut Herlianto (2017:91) Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah dari perencanaan hingga pengawasan Segala aktivitas yang dikerjakan dengan dibiayai dengan anggaran wajib dipertanggung jawabkan kepada yang berkepentingan.

Widiyanti (2017:32) menjelaskan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Sugiman (2018:79) definisi akuntabilitas publik adalah sebagai berikut: “Kewajiban Agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, mengungkapkan dan melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya kepada pemberi mandat.

Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ardiyanti, 2019).

Sementara itu menurut Ultrafiah (2017) akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (kontrol) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya (Nasirah, 2016).

Menurut Sugiman (2018:92) faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban dana publik
2. Penyajian tepat waktu
3. Pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Menurut Andrianto (2017:112), pemerintah yang akuntabel mempunyai faktor dan prinsip sebagai berikut :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
4. Mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah

2.1.3.3 Indikator Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan publik yang tinggi akan pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen pemerintah. Pemerintah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Sugiman (2018:92) menyatakan tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Sesuai Permendagri Nomor 145 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan yakni (Ritonga, 2022:11) :

1. Tahap Perencanaan
 - a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Tahap Pelaporan
 - a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun
 - b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDDesa
 - c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - d. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir
3. Tahap Pertanggung jawaban
 - b. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2.1.4 Pengawasan

2.1.4.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan (*controlling*) adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Pada tahap perencanaan ditetapkan indikator dan target kinerja (Handoko, 2016).

Menurut Mardiasmo (2018: 101) Pengawasan ialah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar supaya rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

Menurut Sugiman (2018:80) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau di perhatikan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen. Dikatakan bahwa pengawasan termasuk fungsi organik administrasi dan manajemen karena apabila fungsi ini tidak dilaksanakan, cepat atau lambat, akan mengakibatkan matinya/hancurnya suatu organisasi. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar (yang dipilih) untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi menjadi tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

2.1.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan

Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang

diinginkanya. Menurut Nasirah (2016:98) pengawasan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Rencana (*planning*) yang harus ditentukan
2. Perintah (*orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*)
3. Tujuan
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Menurut Mardiasmo (2018:59) fungsi pengawasan dapat dibagi dalam tiga macam tipe, atas dasar fokus aktifitas pengawasan, antara lain:

1. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)
Prosedur-prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Merumuskan kebijakan-kebijakan termasuk dalam fungsi perencanaan sedangkan tindakan implementasi kebijakan merupakan bagian dari fungsi pengawasan.
2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Cocurrent Control*)
Concurrent Control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan pada bawahan mereka. *Direction Control* berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk :
 - a. Mengajarkan para bawahan mereka bahwa bagaimana cara penerapan metode-metode serta prosedur-prosedur yang tepat.
 - b. Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Proses memberikan pengarahan bukan saja meliputi caradengan apa petunjuk-petunjuk dikomunikasikan tetapi meliputi juga sikap orang-orang yang memberikan penyerahan.
 - c. Pengawasan *Feed back* (*Feed back Control*) Sifat khas dari metode-metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

2.1.4.3 Indikator Pengawasan

Sistem pengawasan adalah suatu system yang dibentuk oleh manajemen dalam rangka pengawasan dan control terhadap proses kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengawasan memastikan bahwa kebijakan dan

pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan koridor berdasarkan peraturan yang telah dibuat. Pengawasan yang terdapat pada suatu instansi atau organisasi tidak hanya meliputi kegiatan akuntansi dan keuangan saja tetapi mencakup seluruh aspek kegiatan organisasi tersebut.

Menurut Handoko (2016) pengawasan dapat diukur dari indikator sebagai berikut :

1. Penetapan standar
Pengawasan dilakukan dengan menetapkan standar kerja sebagai dasar atau batasan pegawai dalam menjalankan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya untuk pencapaian tujuan.
2. Memantau atau diawasi dan dinilai oleh atasan
Atasan memiliki hak dan kewajiban untuk selalu melakukan pengontrolan atau pengawasan pada apapun yang dilakukan oleh pegawainya didalam lingkungan kerja untuk menghindarkan segala bentuk penyimpangan kerja.
3. Pengukuran kerja
Baik buruknya pekerjaan pegawai harus dapat diukur oleh atasan sebagai bahan kajian atasan untuk melakukan peninjauan perbaikan kerja pegawai
4. Membandingkan
Proses membandingkan hasil dalam pekerjaan pegawai satu dengan pegawai yang lain dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam daya saing pegawai.
5. Tindakan perbaikan atau koreksi
Atasan perlu melakukan perbaikan atas kinerja pegawai yang kurang baik sebagai hasil evaluasi dari kinerja pegawai. Hal ini dilakukan, untuk pencapaian tujuan

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah

terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sukmawati (2019)	Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)	Transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut) partisipasi anggota menunjukkan hubungan yang berpengaruh secara signifikan
2.	Agusthian (2020)	Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (Add) Studi Pada Desa Lam Ara Di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat bimbingan dari pemerintah Kota Banda Aceh.
3.	Riyadi (2020)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan secara simultan memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan, namun secara parsial pengawasan tidak memiliki pengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka
4.	Making (2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dikesare	akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, dan pengawasan berpengaruh

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		kecamatan Lebatukan kabupaten Lembata	positif terhadap pengelolaan dana desa Desa Dikesare kecamatan Lebatukan kabupaten Lembata
5.	Rohman (2023)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian <i>Good Governance</i> (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)	Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan secara simultan memiliki pengaruh Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian <i>Good Governance</i> (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo), namun secara parsial akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa
6.	Anggeli (2024)	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Transparansi Dan Akuntabilitas secara simultan memiliki pengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa, namun secara parsial transparansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		kecamatan Lebatukan kabupaten Lembata	dana desa Desa Dikesare kecamatan Lebatukan kabupaten Lembata
7.	Avellyni & Making (2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya	Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Sumber: Data Diolah, 2024

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Adisasmita (2011) mengatakan transparansi ialah terbukanya pemerintah untuk pemberian informasi terhadap seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya publik untuk pihak yang memerlukan informasi, yakni masyarakat. Selain itu, transparansi yaitu bentuk dari demokrasi yang esensial, setiap warga berhak melihat secara jelas atas aktivitas pemerintah daripada merahasiakan aktivitas tersebut. Pemerintah yang tertutup diduga kurang kompeten dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Transparansi mempunyai dampak langsung pada trust (kepercayaan) dan dampak tidak langsung terhadap satisfaction (kepuasan). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rijal et al. (2021) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2019), dimana transparansi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.3.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

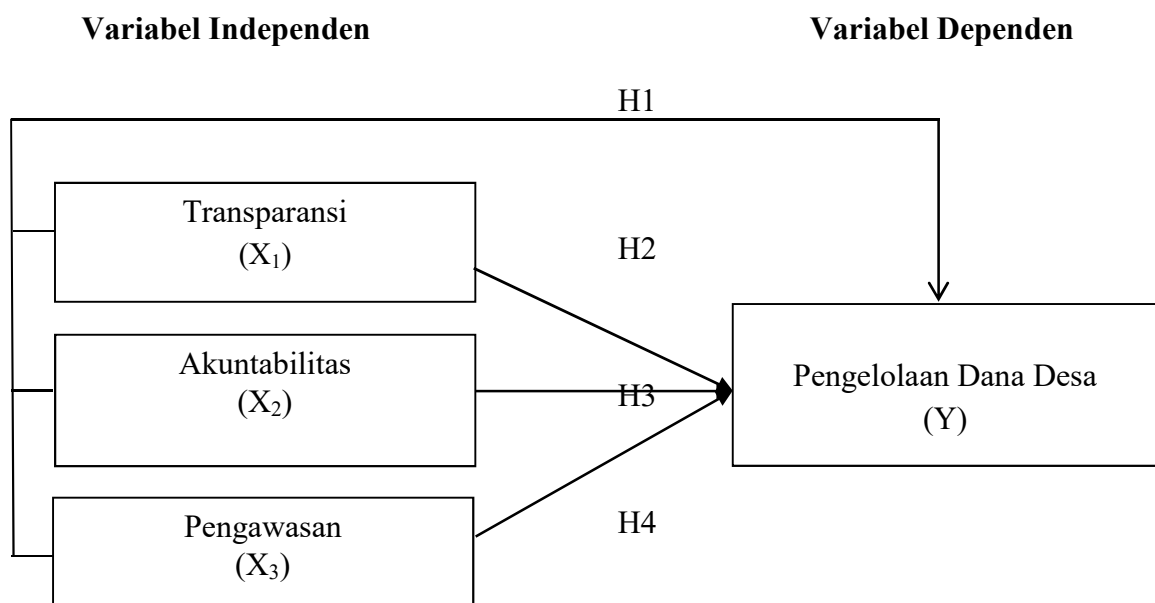
Pada pemerintahan desa, Sukasmonto Supeno (2011: 222) menyatakan, akuntabilitas melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban pada tingkat desa ini dapat dilihat pada penggunaan APBDes yang dimana ADD menjadi salah satu poin penting di dalam APBDes tersebut. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan”. Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip– prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014)

2.3.3 Pengaruh Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan merupakan usaha dalam mengetahui dan menilai suatu kondisi yang sebenarnya terjadi atas dilakukannya tugas atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan, dimana pihak (agent)

mengawasi (principal) dalam kegiatan yang dijalankan untuk mencapai tujuan dan menghindari terjadinya kecurangan. Penelitian sebelumnya (Adnan, 2016) menyebutkan bahwa adanya pengawasan yang optimal diharapkan alokasi dana desa dapat menjadi bagian dalam menggerakkan pengelolaan dana desa. Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa juga diungkapkan oleh umaira dan Adnan (2019). Pengawasan sudah baik dan sesuai terhadap pengelolaan dana desa di desa Sabdodadi. Dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Apabila pengawasan semakin baik maka pengelolaan dana desa juga akan berjalan dengan baik dan sesuai, tidak ada kecurangan maupun kesalahan penggunaan dana desa.

Berikut kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:224) hipotesis adalah dugaan sementara pada penelitian, didalam penelitian ini yang menjadi hipotesis adalah:

- Ha₁: Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
- Ha₂: Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
- Ha₃: Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
- Ha₄: Pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2017: 152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi enam elemen yaitu:

3.1.1 Tujuan Studi

Tujuan studi ini adalah pengujian hipotesis, yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kausalitas, yaitu tipe penelitian yang menyatakan ada pengaruh antara variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap variabel dependen yaitu pengelolaan dana desa Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

3.1.3 Horizon Waktu

Dalam penelitian ini horizon waktu yang digunakan adalah *one shot*, yaitu horizon waktu yang mengumpulkan data penelitian hanya dalam sekali kumpul.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merujuk kepada kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner yang dibagikan kepada pegawai secara individu.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi menurut Sugiyono (2019: 75) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kepala Urusan (Kaur). Dari masing-masing desa yang ada di Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dengan jumlah 50 orang.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel menggambarkan sampel jenuh (sensus) yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono (2019:75)). Penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu dimana seluruh populasi penelitian dijadikan sampel. seperti terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Sampel Penelitian

No	Desa	Jumlah Sampel
1	Lhong Raya	5
2	Lhong Cut	5
3	Lam Ara	5
4	Lampeuot	5
5	Lamlagang	5
6	Geuceu Inem	5
7	Geuceu Kayee Jato	5
8	Geuceu Komplek	5
9	Mibo	5
10	Peunyerat	5
Jumlah		50

Sumber : Data diolah (2024)

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersumber dari pengumpulan data primer dilakukan dengan cara membagikan kuesioner yang telah dipersiapkan kepada seluruh responden yaitu 50. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden (Arikunto, 2013).

Pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Interval yaitu skala yang tidak hanya mengelompokkan individu menurut katagori tertentu dan menentukan urutan kelompok, namun juga mengukur besaran (*magnitude*) perbedaan preferensi antar individu. Dimana jawaban masing-masing responden akan diberi skor dengan menggunakan 5 (lima) poin (Sekaran, 2017:129). Skala pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Skala Pengukuran

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Kurang Setuju	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

Sumber: Sugiyono (2019)

3.4 Operasional Variabel

Definisi dan operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tersebut di lapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala interval. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Item Pertanyaan
Variabel : Dependen				
Pengelolaan Dana Desa (Y)	Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran (Hanifah. dkk, 2019. 55)	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan. 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban (Hanifah. dkk, 2019. 55)	Likert	1 – 5
Variabel : Independen				
Transparansi (X ₁)	Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Mulyaningsih, 2019:64)	1. Ketersediaan Payung hukum 2. Ketersediaan mekanisme bagi publik 3. Ketersediaan sarana dan prasarana 4. Ketersediaan informasi 5. Kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi 6. informasi Mulyaningsih (2019:66)	Likert	1 – 5

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Item Pertanyaan
Akuntabilitas (X ₂)	Kewajiban untuk memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Ritonga, 2022:10)	1. Tahap Perencanaan 2. Tahap Pelaporan 3. Tahap Pertanggung jawaban (Ritonga, 2022:11)	Likert	1 – 3
Pengawasan (X ₃)	Proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Pada tahap perencanaan ditetapkan indikator dan target kinerja. (Handoko, 2016)	1. Penetapan standar 2. Memantau atau diawasi dan dinilai oleh atasan 3. Pengukuran kerja 4. Membandingkan 5. Tindakan perbaikan atau koreksi (Handoko, 2016)	Likert	1 – 5

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data, metode yang digunakan adalah metode regresi linier berganda. Regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui apakah

variabel independen berdampak signifikan dan positif terhadap variabel dependen.

Bentuk persamaan regresinya yaitu (Sugiyono, 2019:204) :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pengelolaan dana desa

X₁ = Transparansi

X₂ = Akuntabilitas

X₃ = Pengawasan

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = Standar Error

3.6 Pengujian Data

3.6.1 Pengujian Validitas

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner dalam penelitian ini. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan *Uji Person Product Movement Coeficient of Corelation* dengan bantuan SPSS (*Statistical Package for Sosial Science*) versi 26,0. Apabila r-hitung > dari r-tabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid karena mempunyai koefisien korelasi diatas nilai kritis korelasi *product moment* yang memiliki tingkat signifikansi dibawah 5% (Sugiyono, 2019:103).

3.6.2 Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas yaitu untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan pada uji reliabilitas adalah metode *Cronbach Alpha* (α) yang lazim digunakan untuk pengujian kuesioner. Untuk mengukur reliabilitas digunakan *coeffisien cronbath alpha* dengan koefisien alphanya lebih besar dari 0,60 (Sekaran, 2017:182).

3.7 Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengukuran variabel dalam penelitian ini maka dilakukan pengujian untuk setiap hipotesis. Untuk menentukan menerima atau menolak hipotesis yang diajukan, maka dilakukan uji-t untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu membandingkan nilai t_{tabel} dengan t_{hitung} dengan tingkat signifikan 5%.

1. Secara Simultan

- a. Menentukan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_a) sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$; akuntabilitas, partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan anggaran secara simultan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

$H_a : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$; akuntabilitas, partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

2. Secara Parsial

$H_0 \beta_1 = 0$; akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

$H_0 \beta_1 \neq 0$; akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

$H_0 \beta_2 = 0$; partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

$H_0 \beta_2 \neq 0$; partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

$H_0 \beta_3 = 0$; pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

$H_0 \beta_3 \neq 0$; pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut:

$B_2 = 0$; H_0 tidak di tolak

$B_2 \neq 0$; H_0 di tolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Banda Raya

Kecamatan Banda Raya adalah salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh. Kecamatan Banda Raya terdiri dari 2 mukim, 10 Gampong dan 41 Dusun. Wilayah Kecamatan Banda Raya berbatasan dengan Kecamatan Baiturrahman pada sebelah utara dan timur. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jaya Baru dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar. Secara geografis kecamatan Banda Raya terletak pada 95,308100 BT dan 05,522300 LU dengan tinggi rata-rata 0,8 m di atas permukaan laut. Kecamatan Banda Raya memiliki luas area sebesar 630 Ha. Gampong terluas adalah Lhong Raya dengan luas wilayah 131 Ha (20,79 persen) dan gampong terkecil adalah Lampeutot dengan luas wilayah 23,7 Ha (3,76 persen).

Berdasarkan Perda Kota Banda Aceh Nomor 8 tahun 2000 Banda Aceh mengalami pemekaran wilayah dari 5 kecamatan menjadi 9 kecamatan. Kecamatan Banda Raya merupakan pemekaran dari kecamatan Meuraxa. Kecamatan Banda Raya memiliki 10 gampong yaitu :

1. Gampong Mibo
2. Gampong Lam Ara
3. Gampong Lhong Cut
4. Gampong Lhong Raya
5. Gampong Lamlagang

6. Gampong Lampeut
7. Gampong Peunyerat
8. Gampong Geuceu Inem
9. Gampong Geuceu Kayee Jatoo
10. Gampong Geuceu Komplek

4.1.2 Karakteristik Responden

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yang disampaikan secara langsung oleh peneliti kepada para responden dalam hal ini yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kepala Urusan (Kaur). Dari masing-masing desa yang ada di Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dengan jumlah 50 orang. Peneliti mengambil kembali kuesioner untuk selanjutnya ditabulasikan dan diolah menggunakan program SPSS versi 26.0.

Dari jumlah kuesioner yang diedarkan kepada responden sebanyak 50 kuesioner, semuanya telah dikembalikan dengan tingkat pengembalian kuesioner mencapai 100%, seluruh kuesioner yang disebarkan telah terkumpul kembali, sehingga sampel akhir penelitian berjumlah 50 ($n=50$). Karakteristik responden seperti terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1.	Jenis kelamin <ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki • Perempuan 	44 6	88% 12%
2.	Usia <ul style="list-style-type: none"> • 25 – 30 Tahun • 31 – 35 Tahun • 36 – 40 Tahun • > 40 Tahun 	- 7 24 19	- 14% 48% 38%
3.	Pendidikan Terakhir <ul style="list-style-type: none"> • SLTA Sederajat • Diploma • Sarjana • Pascasarjana 	23 6 21 -	46% 12% 42% -
4.	Masa Kerja <ul style="list-style-type: none"> • 1 – 5 tahun • 6 – 10 tahun • 11 – 15 tahun • > 15 tahun 	24 17 5 4	48% 34% 10% 8%
5.	Gaji Perbulan <ul style="list-style-type: none"> • < Rp. 2.000.000 • Rp. 2.000.000 – 3.000.000 • Rp. 3.000.000 – 4.000.000 • > Rp. 4.000.000 	9 37 4 -	18% 74% 8% -
Jumlah		50	100%

Berdasarkan Tabel 4.1, maka dapat dijelaskan bahwa jenis kelamin pria lebih mendominasi pegawai pada Kantor Desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh yaitu sebanyak 88% atau 44 orang dan hanya 12% atau 6 orang berjenis kelamin perempuan. Rata-rata perangkat Desa yang berhubungan langsung dengan penyusunan laporan keuangan desa berusia 36 - 40 tahun atau 48%. Dan 21 dengan

Berdasarkan Tabel 4.2, maka dapat dijelaskan bahwa variabel transparansi diperoleh nilai rerata sebesar 4,328 yang bermakna bahwa responden dalam penelitian ini menyatakan setuju jika Adanya payung hukum bagi akses informasi publik dan semua di informasikan secara transparan.

4.2.2 Akuntabilitas

Variabel ini dijabarkan dalam 3 (tiga) pernyataan, terlihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Akuntabilitas

N O	Variabel	STS		TS		KS		S		SS		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	2	3										4
1	Selalu ada perencanaan untuk anggaran yang akan di buat	0	0	0	0	0	0	23	46,0	27	54,0	4,540
2	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan	0	0	0	0	0	0	24	48,0	26	52,0	4,520
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa	0	0	0	0	0	0	28	56,0	22	44,0	4,440
Rerata												4,500

Berdasarkan Tabel 4.3, maka dapat dijelaskan bahwa variabel akuntabilitas diperoleh nilai rerata sebesar 4.500 yang bermakna bahwa responden dalam penelitian ini menyatakan setuju jika Selalu ada perencanaan untuk anggaran yang akan di buat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2.3 Pengawasan

Variabel ini dijabarkan dalam 5 (lima) pernyataan, terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Pengawasan

N O	Variabel	STS		TS		KS		S		SS		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	2	3										4
1	Pengawasan dilakukan dengan menetapkan standar kerja sebagai dasar atau batasan pegawai dalam menjalankan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya untuk pencapaian tujuan.	0	0	0	0	0	0	44	88,0	6	12,0	4,120
2	Atasan memiliki hak dan kewajiban untuk selalu melakukan pengontrolan atau pengawasan pada apapun yang dilakukan oleh pegawainya didalam lingkungan kerja untuk menghindarkan segala bentuk penyimpangan kerja	0	0	0	0	0	0	34	68,0	16	32,0	4,320
3	Baik buruknya pekerjaan pegawai harus dapat diukur oleh atasan sebagai bahan kajian atasan untuk melakukan penijauan perbaikan kerja pegawai	0	0	0	0	0	0	33	66,0	17	34,0	4,340
4	Adanya perbandingan membandingkan hasil dalam pekerjaan pegawai satu dengan pegawai yang lain	0	0	0	0	0	0	28	56,0	22	44,0	4,440

5	Atasan perlu melakukan perbaikan atas kinerja pegawai yang kurang baik sebagai hasil evaluasi dari kinerja pegawai. Hal ini dilakukan, untuk pencapaian tujuan	0	0	0	0	0	0	33	66,0	17	34,0	4,340
Rerata												4.312

Berdasarkan Tabel 4.4, maka dapat dijelaskan bahwa variabel pengawasan diperoleh nilai rerata sebesar 4.312 yang bermakna bahwa responden dalam penelitian ini menyatakan setuju jika Adanya perbandingan membandingkan hasil dalam pekerjaan pegawai satu dengan pegawai yang lain dan dilakukan pengawasan.

4.2.4 Pengelolaan Dana Desa

Variabel ini dijabarkan dalam 4 (empat) pernyataan, terlihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Pengelolaan Dana Desa

N O	Variabel	STS		TS		KS		S		SS		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	2	3										4
1	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa	0	0	0	0	0	0	38	76,0	12	24,0	4,240
2	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang	0	0	0	0	0	0	44	88,0	6	12,0	4,120

	dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Walikota											
3	Penatausahaan keuangan melakukan pencatatan baik dari setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta penutupan dilakukan di setiap akhir bulan	0	0	0	0	0	0	29	58,0	21	42,0	4,420
4	Pelaporan Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui camat	0	0	0	0	0	0	29	58,0	21	42,0	4,420
5	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa	0	0	0	0	0	0	29	58,0	21	42,0	4,420
Rerata												4.324

Berdasarkan Tabel 4.5, maka dapat dijelaskan bahwa variabel pengelolaan dana desa diperoleh nilai rerata sebesar 4.324 yang bermakna bahwa responden dalam penelitian ini menyatakan setuju jika adanya pelaporan pengelolaan dana desa salah satunya berbentuk melakukan pencatatan baik dari setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta penutupan dilakukan di setiap akhir bulan.

4.3 Hasil Pengujian Data

4.3.1 Pengujian Instrumen

a. Hasil Pengujian Validitas

Uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner dalam penelitian ini. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji

validitas dalam penelitian ini menggunakan *Uji Person Product Movement Coefficient of Corelation* dengan bantuan SPSS (*Statistical Package for Sosial Science*). Untuk penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.6 bahwa hasil pengujian nilai kritis untuk mengukur kedua variabel dalam penelitian ini adalah 0,344. Maka item pertanyaan dinyatakan valid karena mempunyai koefisien korelasi diatas nilai kritis korelasi *product moment*. Seperti terlihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Validitas

No	Pernyataan	Variabel	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis 5% (df = N-3)	Keterangan
1	A1	X ₁	0,634	0,288	Valid
2	A2		0,689	0,288	Valid
3	A3		0,395	0,288	Valid
4	A4		0,858	0,288	Valid
5	A5		0,858	0,288	Valid
6	B1	X ₂	0,890	0,288	Valid
8	B2		0,903	0,288	Valid
9	B3		0,967	0,288	Valid
10	C1	X ₃	0,297	0,288	Valid
11	C2		0,786	0,288	Valid
12	C3		0,862	0,288	Valid
13	C4		0,730	0,288	Valid
14	C5		0,862	0,288	Valid
15	D1	Y	0,591	0,288	Valid
16	D2		0,388	0,288	Valid
17	D3		0,952	0,288	Valid
18	D4		0,952	0,288	Valid
19	D5		0,952	0,288	Valid

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini semuanya memiliki tingkat signifikansi dibawah 5%, maka item pernyataan dinyatakan valid, karena nilai r -hitung $>$ nilai r -tabel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 responden, jadi nilai r -tabel nya adalah 0,288, dan semua hasil dari kedua variabel mendapat nilai koefesien korelasi lebih dari 0,288, sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

b. Hasil Pengujian Reliabilitas

Untuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas *cronbach alpha* yang lazim digunakan untuk pengujian kuesioner dalam penelitian ilmu sosial. Analisis ini digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel. Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten juga dilakukan secara statistik yaitu dengan menghitung besarnya *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS versi 23.0. seperti terlihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Reliabilitas

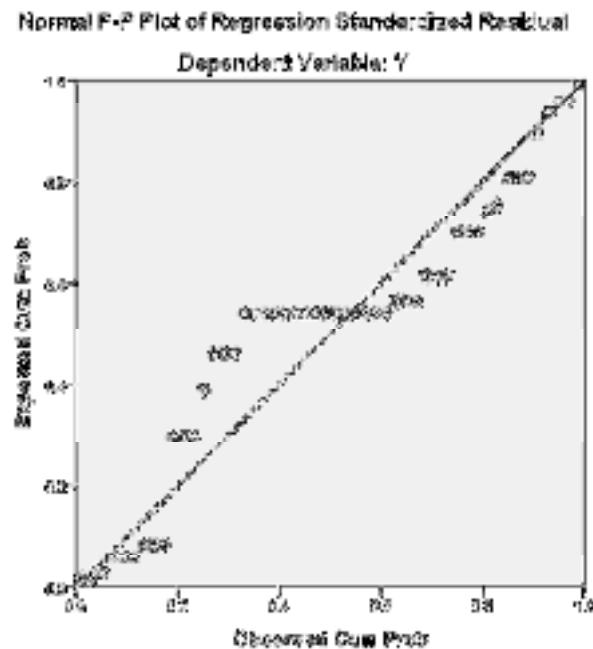
Variabel	Jumlah Item	Alpha
Transparansi (X_1)	5	0,741
Akuntabilitas (X_2)	3	0,909
Pengawasan (X_3)	5	0,776
Pengelolaan dana desa (Y)	5	0,851

Berdasarkan Tabel 4.6, maka pengujian reliabilitas dengan *cronbach alpha* terhadap 18 pernyataan yang telah dinilai jawabannya, maka dapat dilihat bahwa alpha untuk variabel transparansi sebesar 0,741, variabel akuntabilitas sebesar 0,909, pengawasan nilainya 0,776 dan pengelolaan dana desa memiliki nilai alpa 0,851. karena memiliki nilai $> 0,6$, mengacu kepada syarat suatu instrumen dikatakan reliabel memiliki alpha $> 0,6$, maka kuesioner penelitian ini dinyatakan reliabel untuk dilakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

c. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

1. Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas menggambarkan residul variabel yang terdistribusi normal akan terletak disekitar garis horizontal (tidak terpancar jauh dari garis diagonal). Berdasarkan uji normalitas gambar normal P-P Plot menunjukkan sebaran *standarrized residul* berada dalam kisaran garis diagonal. Seperti terlihat pada gambar berikut. Normal P-P Plot menunjukkan sebaran *standarrized residul* berada dalam kisaran garis diagonal. Seperti terlihat pada Gambar 4.1.



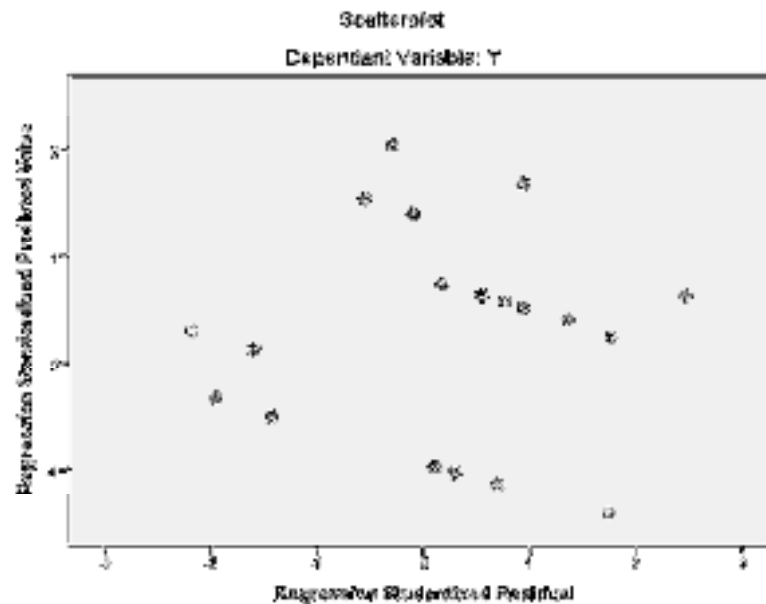
Gambar 4.1. P.Plot

Berdasarkan gambar 4.1 uji normalitas untuk persamaan transparansi, akuntabilitas dan pengawasan terhadap Pengelolaan dana desa dapat dilihat pada histogram dan *normal probability plot* di atas dapat dilihat bahwa histogram distribusi data dalam bentuk lonceng (*bell shaped*) dan garis *normal probability plot* yang menggambarkan sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya. Dengan demikian maka data yang diolah mengikuti atau mendekati distribusi normal.

2. Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas.

Hasil pengujian heteroskedastisitas data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS dengan mengamati pola yang terdapat pada Scatterplot, dimana hasilnya dapat dilihat pada Gambar IV.2 berikut :



Gambar IV.2
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar IV.2 uji heteroskedastisitas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.2 Regresi Linier Berganda

Untuk melihat pengaruh sistem transparansi, akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya, menggunakan regresi linier berganda. Seperti pada Tabel 4.7.

Tabel 4.8**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.911	1.080		.844	.403		
Transparansi	.340	.105	1.187	2.800	.000	.218	4.585
Akuntabilitas	.398	.076	.076	4.300	.000	.554	1.804
Pengawasan	.538	.097	.218	2.455	.018	.238	4.204

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS seperti terlihat pada tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi untuk pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pengawasan terhadap Pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Persamaannya dapat kita lihat sebagai berikut:

$$Y = 3,911 + 0,340X_1 + 0,398X_2 + 0,538X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 3,911 dapat diartikan bahwa tanpa adanya transparansi akuntabilitas dan pengawasan, pengelolaan dana desa telah ada nilai sebesar 3,911.

4.3.3 Koefisien Determinasi

Hasil pengolahan data juga menunjukkan hubungan antara variabel predictor dengan kriteriumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi/koefisien determinasi yang dihasilkan oleh sebuah persamaan regresi yang dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.9
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson
					df1	df2	Sig. F Change	
1	.956 ^a	.914	.908	.54760	3	46	.000	2.358

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Koefesien Determinasi (R^2) sebesar 0,914 artinya sebesar 91,4% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (pengawasan) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam Faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti transparansi, akuntabilitas dan pengawasan. Sisanya 8,6% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain yang tidak ada didalam penelitian ini.

4.3.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk keempat rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

H_1 : Nilai F_{hitung} sebesar 162,279 > F_{tabel} sebesar 2,802, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima. Artinya transparansi, akuntabilitas dan pengawasan berpengaruh dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)

H_2 : Nilai t_{hitung} sebesar $2,800 > t_{tabel}$ sebesar $2,012$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima. Artinya transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

H_3 : Nilai t_{hitung} sebesar $4,300 > t_{tabel}$ sebesar $2,012$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima. Artinya akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

H_4 : Nilai t_{hitung} sebesar $2,455 > t_{tabel}$ sebesar $2,012$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima. Artinya pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pembahasan Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa Konstanta (α) sebesar $3,911$ yang berarti jika variabel transparansi, akuntabilitas dan pengawasan dianggap konstan, semakin baik transparansi, akuntabilitas dan pengawasan, maka pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh akan semakin meningkat. setiap dilakukan peningkatan transparansi pada kantor desa, maka akan meningkatkan

pengelolaan dana desa. Begitu pula dengan adanya akuntabilitas dan pengawasan yang baik, yang juga akan meningkatkan pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfatih (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance* pada desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

4.4.2 Pembahasan Transparansi terhadap Pengelolaan dana desa Pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa transparansi berpengaruh dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai Koefisien regresi variabel transparansi sebesar 0,340, yang berarti bahwa setiap meningkatnya transparansi sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh sebesar 34%.

Transparansi menjadi syarat penting yang harus dipenuhi dalam pengelolaan dana desa. transparansi yaitu bentuk dari demokrasi yang esensial, setiap warga berhak melihat secara jelas atas aktivitas pemerintah daripada merahasiakan aktivitas tersebut. Pemerintah yang tertutup diduga kurang kompeten dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dari hasil penelitian juga di dapatkan bahwa sesuai indikator transparansi desa, setiap desa juga menyampaikan hasil pemeriksaan melalui rapat semua wakil di setiap dusun dan perwakilan masyarakat, sehingga transparansi dana

desa dapat terlaksana dengan baik. Namun penelitian Anggeli (2024) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan dana desa.

4.4.3 Pembahasan Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa akuntabilitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya. Hal ini dibuktikan dengan hasil Koefisien regresi variabel akuntabilitas sebesar 0,398, yang berarti bahwa setiap meningkatnya akuntabilitas maka pengelolaan dana desa pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya akan meningkat pula sebesar 1 satuan.

Variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa Kecamatan Banda Raya, dengan adanya akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan dana desa pun akan baik.

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program. Hal ini sesuai dengan indikator dari akuntabilitas yaitu adanya laporan dan informasi sebagai bentuk akuntabilitas dan hasil penelitian anggeli (2024) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan dana desa. Namun pada penelitian Namun penelitian Rohman (2023)

menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan alokasi dana desa.

4.4.4 Pembahasan Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya. Hal ini dibuktikan dengan hasil Koefisien regresi variabel pengawasan sebesar 0,538, yang berarti bahwa setiap meningkatnya pengelolaan dana desa pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan pengelolaan dana desa sebesar 54%.

Variabel pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa Kecamatan Banda Raya, dengan adanya pengawasan, maka untuk mencapai tujuan program dan menghindari terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa bentuk pengawasan di kecamatan Banda Raya yaitu adanya kegiatan-kegiatan atau rapat pertemuan seperti Musrembangdes yang merupakan kegiatan musyawarah tahunan yang diadakan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembagunan Desa, Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) yang dihadiri oleh perangkat desa, para “Tuha Peut” atau badan legislatif permusyawaratan gampong, serta perwakilan masyarakat. Sehingga pengawasan dalam penyerapan anggaran desa bisa terlaksana dengan baik. hal ini sesuai dengan indikator pengawasan dalam pengelolaan dana desa yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dana

desa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rohman (2023) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan dana desa. Namun pada penelitian Namun penelitian Riyadi (2020) menyatakan bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Transparansi, akuntabilitas dan pengawasan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.
2. Transparansi berpengaruh dan signifikan terhadap Pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
3. Akuntabilitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
4. Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana desa pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Mengenai responden, agar penelitian dapat dikatakan lebih representatif, maka diharapkan dalam penelitian selanjutnya, kapasitas nya lebih luas tidak hanya pada Kantor Desa Kecamatan Banda Raya.
2. Menambahkan variabel penelitian sehingga penelitian dapat lebih meyakinkan
3. Menggunakan variabel sehingga penelitian dapat lebih representatif

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rozaki, dkk, (2015). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Yogyakarta : Ire Press.
- Andini, Hanni. (2017). “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”.Yogyakarta. *Skripsi* Universitas Dharma. Skripsi
- Andrianto. (2017). *Transparasi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Egoovernmen*, Malang: Bayumedia Publishing
- Anggeli. Firda. S. (2024). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 13 No. 1
- Agusthian. Ananda. (2020). Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (Add) Studi Pada Desa Lam Ara Di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 5, No. 2
- Ardiyanti, Rika. (2019). “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa”. Semarang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Arifianti, H. (2013). Pengaruh Pemeriksaan Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Thesis* (Doctoral Dissertation, UNS (Sebelas Maret University)
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Avellyni, A., & Making, L. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
- Damayanti, Wienda. (2018). “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pangaribowo, Danni. (2018).“Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas”. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Elsa Dwi Wahyu Dewanti, Suarno, dan Kurrohman T. (2016). “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus

pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)".
Akuntansi, Universitas Jember

Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
Semarang: Rineka Cipta

Handoko, T. Hani. (2016). *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE

Hanifah, dkk. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset*
Akuntansi, Vol. 4 No. 8.

Herlianto, Didit. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta. Gosyen
Publishing

Irfan M, I Wayan. 2017 skripsi : "Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten
Lampung". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Kompas. (2024). <https://dialeksis.com/polikum/dana-desa-jadi-potensi-ladang-korupsi-terbesar-di-aceh/>

Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta.
UPP STIM YKPN.

Making, N. H. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan
terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1).

Mardiasmo. (2018). "*Akuntansi Sektor Publik*". Yogyakarta: ANDY Yogyakarta

Mondong, Hendra. (2013). "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa." *ejournal unstrat*.
Vol.IX.No.6

Mulyaningsih, Sri. (2019) , "Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon
Simpangkalan". Lampung . *skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas.

Nasirah. (2016). "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (study kasus pada desa Mulyo agung Kecamatan Dau)".
Skripsi. Universitas Muhammadiyah, Malang

Permendagri Nomor 113 Tahun (2014), *dalam melaksanakan tugas, kewenangan,
hak dan kewajiban, kepala desa wajib*

- Riyadi. Wulan. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. Vol. 3 No. 2
- Rohman. Taufiqur. M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Pendidikan Akuntansi*. Vol. 6. No. 3
- Rochmansjah, Heru. (2015). “*Pengelolaan Keuangan Desa*”. Bandung: Fokusmedia.
- Rosa. Indah. P. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Banda Aceh: Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 9, No. 1
- Sari, A. N. (2018). Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya
- Sekaran. Uma. (2017). *Metodelogi Penelitian*. CV. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. (2015). *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta. Edisi revisi.
- Sugiman, (2018). “*Pemerintahan Desa*”. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma.
- Sugiyono, (2019). *Psikologi Abnormal*. Edisi Ke-9: Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Utafiah, Weny. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partispasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance* Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palembang
- Widiyanti, Arista. 2017. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Kandung, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Dipublikasikan. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

KUESIONER

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH)

Penelitian Ini Semata-Mata Bersifat Ilmiah Untuk Mendapatkan Data Bagi Penulisan Skripsi Pada Universitas Muhammadiyah Aceh. Saya sangat menghargai bantuan saudara/i yang telah menjawab semua pertanyaan dengan kondisi yang berlaku pada diri saudara/i sendiri. Berilah tanda (✓) pada jawaban yang sesuai dengan pilihan saudara/i.

I. Identitas Responden

1. jenis Kelamin:

☐

Pria

☐

Wanita

2. Umur :

☐

25 – 30 tahun

☐

36 - 40 tahun

☐

31 – 35 tahun

☐

> 40 tahun

3. Pendidikan terakhir :

☐

SLTA Sederajat

☐

Sarjana

☐

Diploma

☐

Pascasarjana

4. Masa Kerja

☐

1 – 5 Tahun

☐

11 - 15 tahun

☐

6 - 10 Tahun

☐

> 15 tahun

5. Gaji

☐

< Rp.2.000.000

☐

Rp.3.000.000

☐

Rp. 2.000.000 – 3.000.000

☐

> Rp. 4.000.000

Alternatif Pilihan :

- (1) Sangat Tidak Setuju (STS)
- (2) Tidak Setuju (TS)
- (3) Kurang Setuju (KS)
- (4) Setuju (S)
- (5) Sangat Setuju (SS)

Transparansi (X1)

NO	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Adanya payung hukum bagi akses informasi publik					
2	Adanya mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi					
3	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mengakses informasi					
4	informasi untuk dipublikasikan kepada publik					
5	informasi publik sangat mudah dan cepat untuk didapatkan					

Sumber: Agusthian (2020)

Akuntabilitas (X2)

NO	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Selalu ada perencanaan untuk anggaran yang akan di buat					
2	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan					
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa					

Sumber: Agusthian (2020)

Pengawasan (X3)

NO	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Pengawasan dilakukan dengan menetapkan standar kerja sebagai dasar atau batasan pegawai dalam menjalankan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya untuk pencapaian tujuan.					
2	Atasan memiliki hak dan kewajiban untuk selalu melakukan pengontrolan atau pengawasan pada apapun yang dilakukan					

	oleh pegawainya didalam lingkungan kerja untuk menghindarkan segala bentuk penyimpangan kerja					
3	Baik buruknya pekerjaan pegawai harus dapat diukur oleh atasan sebagai bahan kajian atasan untuk melakukan penijauan perbaikan kerja pegawai					
4	Adanya perbandingan membandingkan hasil dalam pekerjaan pegawai satu dengan pegawai yang lain					
5	Atasan perlu melakukan perbaikan atas kinerja pegawai yang kurang baik sebagai hasil evaluasi dari kinerja pegawai. Hal ini dilakukan, untuk pencapaian tujuan					

Sumber: Agusthian (2020)

Pengelolaan Dana Desa (Y)

NO	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa					
2	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Walikota					
3	Penatausahaan keuangan melakukan pencatatan baik dari setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta penutupan dilakukan di setiap akhir bulan					
4	Pelaporan Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui camat					
5	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa					

Sumber: Agusthian (2020)

TABULASI DATA

NO	TRANSPARANSI (X1)					AKUNTABILITAS (X2)			PENGAWASAN (X3)					PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN (Y)				
	a1	a2	a3	a4	a5	b1	b2	b3	c1	c2	c3	c4	c5	d1	d2	d3	d4	d5
1	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
3	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
9	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
14	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5
22	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4
23	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5
24	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5
25	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5
29	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5

[illegible]

TABULASI DATA

NO	KINERJA PEGAWAI (Y)					KEPUASAN KERJA (X1)			KOMITMEN ORGANISASI (X2)		
	a1	a2	a3	a4	a5	b1	b2	b3	c1	c2	c3
1	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
9	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5
11	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
14	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
18	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5
22	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4
23	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5
24	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5
25	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4
26	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4
29	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5
30	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4

Frequency Table

Adanya payung hukum bagi akses informasi publik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	28	56.0	56.0	56.0
	5.0	22	44.0	44.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Adanya mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	38	76.0	76.0	76.0
	5.0	12	24.0	24.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Tersedianya sarana dan prasarana untuk mengakses informasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	44	88.0	88.0	88.0
	5.0	6	12.0	12.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

informasi untuk dipublikasikan kepada public

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	29	58.0	58.0	58.0
	5.0	21	42.0	42.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

informasi publik sangat mudah dan cepat untuk didapatkan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	29	58.0	58.0	58.0
	5.0	21	42.0	42.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Selalu ada perencanaan untuk anggaran yang akan di buat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	23	46.0	46.0	46.0
	5.0	27	54.0	54.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	24	48.0	48.0	48.0
	5.0	26	52.0	52.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	28	56.0	56.0	56.0
	5.0	22	44.0	44.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Pengawasan dilakukan dengan menetapkan standar kerja sebagai dasar atau batasan pegawai dalam menjalankan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya untuk pencapaian tujuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	44	88.0	88.0	88.0
	5.0	6	12.0	12.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Atasan memiliki hak dan kewajiban untuk selalu melakukan pengontrolan atau pengawasan pada apapun yang dilakukan oleh pegawainya didalam lingkungan kerja untuk menghindari segala bentuk penyimpangan kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	34	68.0	68.0	68.0
	5.0	16	32.0	32.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Baik buruknya pekerjaan pegawai harus dapat diukur oleh atasan sebagai bahan kajian atasan untuk melakukan penilaian perbaikan kerja pegawai

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	33	66.0	66.0	66.0
	5.0	17	34.0	34.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Adanya perbandingan membandingkan hasil dalam pekerjaan pegawai satu dengan pegawai yang lain

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	28	56.0	56.0	56.0
	5.0	22	44.0	44.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Atasan perlu melakukan perbaikan atas kinerja pegawai yang kurang baik sebagai hasil evaluasi dari kinerja pegawai. Hal ini dilakukan, untuk pencapaian tujuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	33	66.0	66.0	66.0
	5.0	17	34.0	34.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	38	76.0	76.0	76.0
	5.0	12	24.0	24.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Walikota

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	44	88.0	88.0	88.0
	5.0	6	12.0	12.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Penatausahaan keuangan melakukan pencatatan baik dari setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta penutupan dilakukan di setiap akhir bulan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	29	58.0	58.0	58.0
	5.0	21	42.0	42.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Pelaporan Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui camat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	29	58.0	58.0	58.0
	5.0	21	42.0	42.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.0	29	58.0	58.0	58.0
	5.0	21	42.0	42.0	100.0
Total		50	100.0	100.0	

Correlations

		Correlations					
		a1	a2	a3	a4	a5	X1
a1	Pearson Correlation	1	.445**	.045	.307*	.307*	.634**
	Sig. (2-tailed)		.001	.758	.030	.030	.000
	N	50	50	50	50	50	50
a2	Pearson Correlation	.445**	1	.225	.376**	.376**	.689**
	Sig. (2-tailed)	.001		.117	.007	.007	.000
	N	50	50	50	50	50	50
a3	Pearson Correlation	.045	.225	1	.185	.185	.395**
	Sig. (2-tailed)	.758	.117		.199	.199	.005
	N	50	50	50	50	50	50
a4	Pearson Correlation	.307*	.376**	.185	1	1.000**	.858**
	Sig. (2-tailed)	.030	.007	.199		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
a5	Pearson Correlation	.307*	.376**	.185	1.000**	1	.858**
	Sig. (2-tailed)	.030	.007	.199	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50
X1	Pearson Correlation	.634**	.689**	.395**	.858**	.858**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.005	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

Correlations		b1	b2	b3	X2
b1	Pearson Correlation	1	.639**	.818**	.890**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	50	50	50	50
b2	Pearson Correlation	.639**	1	.852**	.903**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	50	50	50	50
b3	Pearson Correlation	.818**	.852**	1	.967**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	50	50	50	50
X2	Pearson Correlation	.890**	.903**	.967**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Correlations					
		c1	c2	c3	c4	c5	X3
c1	Pearson Correlation	1	.274	-.005	.045	-.005	.297*
	Sig. (2-tailed)		.054	.971	.758	.971	.043
	N	50	50	50	50	50	50
c2	Pearson Correlation	.274	1	.503**	.515**	.503**	.786**
	Sig. (2-tailed)	.054		.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
c3	Pearson Correlation	-.005	.503**	1	.470**	1.000**	.862**
	Sig. (2-tailed)	.971	.000		.001	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
c4	Pearson Correlation	.045	.515**	.470**	1	.470**	.730**
	Sig. (2-tailed)	.758	.000	.001		.001	.000
	N	50	50	50	50	50	50
c5	Pearson Correlation	-.005	.503**	1.000**	.470**	1	.862**
	Sig. (2-tailed)	.971	.000	.000	.001		.000
	N	50	50	50	50	50	50
X3	Pearson Correlation	.297*	.786**	.862**	.730**	.862**	1
	Sig. (2-tailed)	.043	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations							
		d1	d2	d3	d4	d5	Y
d1	Pearson Correlation	1	.225	.376**	.376**	.376**	.591**
	Sig. (2-tailed)		.117	.007	.007	.007	.000
	N	50	50	50	50	50	50
d2	Pearson Correlation	.225	1	.185	.185	.185	.388**
	Sig. (2-tailed)	.117		.199	.199	.199	.005
	N	50	50	50	50	50	50
d3	Pearson Correlation	.376**	.185	1	1.000**	1.000**	.952**
	Sig. (2-tailed)	.007	.199		.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
d4	Pearson Correlation	.376**	.185	1.000**	1	1.000**	.952**
	Sig. (2-tailed)	.007	.199	.000		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50
d5	Pearson Correlation	.376**	.185	1.000**	1.000**	1	.952**
	Sig. (2-tailed)	.007	.199	.000	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50
Y	Pearson Correlation	.591**	.388**	.952**	.952**	.952**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.741	.725	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
a1	4.440	.5014	50
a2	4.240	.4314	50
a3	4.120	.3283	50
a4	4.420	.4986	50
a5	4.420	.4986	50

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.328	4.120	4.440	.320	1.078	.020	5

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
21.640	2.562	1.6005	5

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.909	.909	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
b1	4.540	.5035	50
b2	4.520	.5047	50
b3	4.440	.5014	50

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.500	4.440	4.540	.100	1.023	.003	3

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
13.500	1.929	1.3887	3

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.776	.752	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
c1	4.120	.3283	50
c2	4.320	.4712	50
c3	4.340	.4785	50
c4	4.440	.5014	50
c5	4.340	.4785	50

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.312	4.120	4.440	.320	1.078	.014	5

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
21.560	2.741	1.6557	5

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.851	.828	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
d1	4.240	.4314	50
d2	4.120	.3283	50
d3	4.420	.4986	50
d4	4.420	.4986	50
d5	4.420	.4986	50

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.324	4.120	4.420	.300	1.073	.019	5

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
21.620	3.261	1.8058	5

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	21.6200	1.80577	50
X1	21.6400	1.60051	50
X2	13.5000	1.38873	50
X3	21.5600	1.65566	50

Correlations

		Y	X1	X2	X3
Pearson Correlation	Y	1.000	.947	.574	.769
	X1	.947	1.000	.661	.871
	X2	.574	.661	1.000	.621
	X3	.769	.871	.621	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.000	.000
	X1	.000	.	.000	.000
	X2	.000	.000	.	.000
	X3	.000	.000	.000	.
N	Y	50	50	50	50
	X1	50	50	50	50
	X2	50	50	50	50
	X3	50	50	50	50

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X2, X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson
					df1	df2	Sig. F Change	
1	.956 ^a	.914	.908	.54760	3	46	.000	2.358

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	145.986	3	48.662	162.279	.000 ^b
	Residual	13.794	46	.300		
	Total	159.780	49			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.911	1.080		.844	.403		
	X1	.340	.105	1.187	2.800	.000	.218	4.585
	X2	.398	.076	.076	4.300	.200	.554	1.804
	X3	.538	.097	.218	2.455	.018	.238	4.204

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X1	X2	X3
1	1	3.991	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.005	27.794	.43	.00	.62	.00
	3	.003	37.042	.56	.08	.36	.14
	4	.001	75.396	.01	.92	.02	.85

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

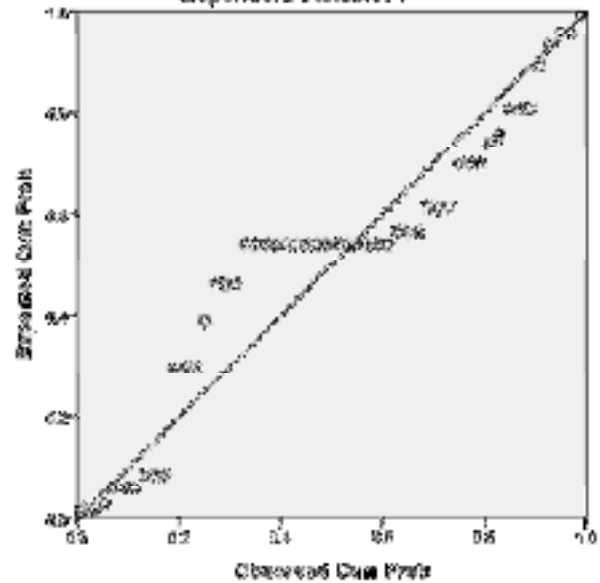
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	19.1708	25.1551	21.6200	1.72607	50
Std. Predicted Value	-1.419	2.048	.000	1.000	50
Standard Error of Predicted Value	.097	.269	.150	.039	50
Adjusted Predicted Value	18.9062	25.1762	21.6110	1.72791	50
Residual	-1.14517	1.28619	.00000	.53057	50
Std. Residual	-2.091	2.349	.000	.969	50
Stud. Residual	-2.178	2.456	.008	1.014	50
Deleted Residual	-1.24236	1.40648	.00896	.58245	50
Stud. Deleted Residual	-2.275	2.606	.005	1.041	50
Mahal. Distance	.562	10.875	2.940	2.203	50
Cook's Distance	.000	.241	.025	.045	50
Centered Leverage Value	.011	.222	.060	.045	50

a. Dependent Variable: Y

Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y



Scatterplot

Dependent Variable: Y

